

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan program yang di canangkan oleh pemerintah guna memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, salah satu hal yang mendukung kesuksesan program tersebut ialah ke ikut sertaan perempuan dalam segala bidang salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan adapun strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu dengan cara menjadikan gender sebagai arus utama dalam bidang pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke bawah (tingkat desa), selain memprioritaskan gender dalam hal pembangunan pemerintah juga harus memberikan ketegasan melalui program Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pembangunan merupakan proses perubahan dalam sebuah kehidupan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan suatu perencanaan yang matang.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di sebutkan bahwasanya perubahan mendasar di lakukan oleh pemerintah Daerah dalam bentuk Desentralisasi, dalam Undang-undang tersebut pemerintah daerah sangat berperan penting guna menyukseskan perubahan yang dulunya berasaskan sentralisasi kini berubah menjadi desentralisasi, dengan adanya Undang-Undang tersebut hubungan antara kekuasaan pusat dengan daerah lebih terbuka, artinya pemerintahan pusat memiliki wewenang lebih guna mengatur hubungan negara dengan Masyarakat Umum tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi masyarakat guna berperan aktif (berpartisipasi) dalam pengambilan suatu keputusan baik itu tingkat daerah maupun desa.

Perencana pembangunan desa adalah model atau panduan guna menemukan gagasan dan potensi desa, dalam proses menemukan gagasan tersebut desa selalu mengikutsertakan masyarakat baik itu dalam proses perencanaan maupun pembangunan, hal ini sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan SDM dan menjadikan proses pembangunan-pembangunan lebih merata.²

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : PT raja Gafarindo persada, 2012. Hal 25.

² W sumpeno, *perencanaan desa terpadu*, Banda Aceh : read, 2011, hal 16.

Dalam perencanaan pembangunan baik itu pembangunan pusat, daerah, hingga tingkat desa sudah menjadi hal yang lumrah apabila di temukan partisipasi perempuan di dalamnya, namun kebanyakan perempuan yang ada dalam perencanaan pembangunan hanya minoritas. Perempuan memiliki sifat yang lembut, penyayang, sabar serta lebih mengutamakan perasaan daripada akal, hal ini berbeda dengan laki laki yang memiliki sifat kasar, egois, kuat, tegas serta lebih mengutamakan akal daripada hati. Dari beberapa uraian di atas perempuan yang menjadi fokus penelitian ini ialah perempuan-perempuan yang aktif di berbagai bidang misalnya, Kader desa, PKK, BPD, Posyandu, keagamaan (Muslimat & Fatayat) serta organisasi-organisasi perempuan yang aktif di desa Tengguli.

Musrenbang dari tingkat nasional, kecamatan, hingga tingkat desa telah di laksanakan. Pemerintahan desa bersama masyarakat desa Tengguli kecamatan Bangsri kabupaten Jepara menggunakan beberapa forum guna merancang pembangunan desa, antara lain karang Taruna, BPD, RT dan Musrenbang. Penelitian ini di fokuskan pada Forum Musrenbang dan RT. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes sudah ada regulasi yang pasti dari kecamatan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (Jukal) dan petunjuk teknis (juknis) yakni partisipasi perempuan minimal 30%.³ Dalam perencanaan pembangunan di harapkan perempuan dapat partisipasi aktif baik itu mengusulkan atau memasukkan agenda-agenda. Partisipasi perempuan merupakan hal yang penting khususnya di negara yang menganut sistem demokrasi khususnya negara Indonesia, oleh karena itu, dalam hal pengambilan suatu keputusan atau perencanaan pembangunan berbagai golongan yang ada di masyarakat baik itu laki-laki maupun wanita dan organisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) harus di ikut sertakan atau berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan baik itu di tingkat daerah atau desa.

Partisipasi perempuan pada era sekarang difungsikan sebagai tolok ukur kesuksesan program yang di canangkan oleh pemerintah. Dari segi keterlibatannya partisipasi dapat di golongkan menjadi dua yakni partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung, partisipasi langsung dalam proses pelaksanaannya masyarakat atau partisipan mengikuti diskusi, pertemuan, atau rapat secara langsung serta menyediakan fikiran dan tenaga untuk memberikan gagasan dalam forum tersebut. Partisipasi tidak langsung di gunakan untuk

³ Ahmad Hevriansyah, *hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem proporsional representatif pada pemilu legislatif*, awasi : Jurnal pemilu dan demokrasi. Hal 67-85.

mengambarkan keikutsertaan seseorang yang mewakili hak partisipasinya.

Dalam hal partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Desa tengguli, kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara menggunakan golongan pertama yaitu partisipasi langsung. Hasil wawancara dengan perangkat desa tengguli, di desa tengguli kecamatan Bangsri kabupaten Jepara partisipasi perempuan sudah cukup baik, dan keterwakilan perempuan 30% sudah terpenuhi, hal ini terlihat pada kesempatan Rapat Evaluasi akhir pembangunan dan musrenbang perempuan-perempuan mulai dari PKK, kader, Guru, karang taruna, tokoh agama tokoh Masyarakat telah di undangan dalam forum tersebut.

Secara umum partisipasi perempuan-perempuan di desa tengguli sudah sangat baik di lihat dari segi keaktifan yang mendominasi ialah kaum perempuan, hal ini terlihat ketika pembukaan forum oleh kepala desa (kades), masing-masing anggota forum berkumpul menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bidangnya, dalam musrenbang sumber acuan utama dalam setiap rapat musrenbang adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa), di dalam RKP-Desa tahun 2024 terdapat beberapa jenis bidang kegiatan di antaranya bidang penyediaan sarana dan prasarana desa, bidang pertanahan, bidang pendidikan bidang penyelenggaraan pos dan Kesehatan desa, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang kebudayaan dan pembangunan, bidang kelembagaan desa dan bidang-bidang lainnya.

Fokus utama dari masing-masing kelompok ialah memberikan usulan, pandangan, gagasan, maupun sanggahan di dalam kelompok nya masing-masing dan setiap kelompok dipimpin atau di koordinir dari perangkat desa yang sesuai dengan bidangnya. Dalam musyawarah kelompok tersebut perempuan yang terdiri dari anggota PKK, kader desa, para guru, karang taruna, serta ormas-ormas keagamaan mereka, aktif dalam memberikan usulan, pendapat, gagasan, atau pandangannya mengenai perencanaan pembangunan ke depannya, walaupun mayoritas yang mempresentasikan hasil diskusi tersebut ialah kaum laki-laki.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwasanya partisipasi perempuan secara umum dalam hal perencanaan pembangunan di desa tengguli sudah cukup baik dan dari segi keaktifan mereka juga cukup aktif, walaupun mereka para perempuan terkadang juga tidak sepenuhnya hadir, hal ini di pengaruhi dari beberapa faktor seperti

urusan keluarga yang urgen, pekerjaan yang tidak bisa di tinggal, mengurus anak, dan lain lain.⁴

Forum perencanaan pembangunan yang ke dua ialah tingkat RT, di desa tengguli kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara selalu mengadakan pertemuan rutin minimal satu bulan sekali bahkan ada yang dua minggu sekali, pertemuan tersebut berada di lingkup RT masing-masing atau yang lebih di kenal dengan istilah “RT nan”, dan pasti kalau ada pembangunan atau perencanaan pembangunan bapak RT selalu mendapat arahan atau amanah dari perangkat setempat guna menyampaikan proses perencanaan pembangunan yang sedang di rancang di desa tengguli, hal sekecil apa pun apabila menyangkut hajat orang banyak pasti akan di sampaikan dalam forum tersebut.

Dalam kegiatan atau forum RT nan yang paling mendominasi adalah kaum laki-laki walau begitu terdapat berpartisipasi perempuan yang ikut andil dalam kegiatan tersebut dan jumlahnya hampir sebanding dengan jumlah laki- laki, misalnya dalam forum “RT nan” RT 05 RW 03 dengan jumlah anggota kurang lebih 27 orang, partisipasi perempuan 13 perempuan didalam-Nya. Di RT 06 RW 03 dari 20 anggota, partisipasi 9 perempuan di dalamnya. Di RT 04 RW 02 30 anggota partisipasi perempuan 14 orang.

Dalam rapat atau proses perencanaan pembangunan di tingkat RT tingkat keaktifan perempuan masih tergolong rendah, bahkan di beberapa rapat RT para perempuan hanya “sendiko dawuh”. Menurut KH. Husein Muhammad perempuan memiliki hak dan kesetaraan yang sama dengan laki-laki, baik itu hak atau kesetaraan dalam bernegara dalam berbagai bidang seperti halnya bidang ; sosial, politik, ekonomi sampai dengan hak untuk mengeluarkan pendapat pribadinya. Sedangkan dalam sudut pandang Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja terdapat beberapa larangan yang tidak boleh di lakukan oleh wanita sebagaimana menjadi Imam Shalat Untuk laki-laki yang sudah Balig serta memenuhi syarat syah Shalat hal tersebut tidak boleh di lakukan, maka yang seharusnya menjadi Imam Shalat ialah laki-Laki tersebut, walaupun umurnya jauh lebih muda dari si wanita tersebut yang terpenting telah memenuhi Syarat dan Rukun. Kesetaraan Gender dan keadilan gender merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Keadilan gender di wujudkan dengan cara perlakuan adil antara laki laki dan perempuan, semua orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan yang baik,

⁴ Wawancara, Perangkat desa Tengguli, tanggal 21 Oktober 2023, pukul 19.30

memperoleh manfaat yang sama, serta berhak berpartisipasi di berbagai hal misalnya dalam bidang pembangunan, ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam menyikapi hal tersebut KH. Husein Muhammad Memberikan definisi guna terciptanya keadilan dan kesetaraan gender, antara laki -laki dan perempuan memiliki hak yang sama, sebagaimana laki-laki berkecimpung di dunia bisnis, politik, ekonomi dan lain-lain, wanita juga memiliki pilihan sebagaimana kaum laki-laki. Namun perlu di ingat walaupun perempuan hak dan kesetaraan dengan laki-laki dia juga tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan.

Menurut KH. Husein Muhammad partisipasi diartikan sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Dalam panggung sejarah politik Islam terdapat sejumlah tokoh perempuan yang kerap berpartisipasi serta kerap tampil di ranah publik antara lain : Aisyah, Khadijah, dan Ummu Salamah. Para perempuan tersebut kerap berdiskusi (bermusyawarah) dan ikut andil dalam berbagai perumusan kebijakan dan juga mengkritisi kebijakan.⁵

KH. Husein Muhammad memberikan konsep berkaitan dengan partisipasi perempuan bahwasanya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yakni hak untuk berpartisipasi dalam ranah publik khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan di suatu negara atau daerah. sudah sepatutnya para kaum wanita sebagai khalifah di atas muka bumi partisipasi dalam ranah publik seperti halnya bermusyawarah menentukan arah pembangunan yang tepat guna menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan hukum yang tegak sebagaimana mestinya, serta pembangunan berkelanjutan Yang mengarah pada peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik.⁶

KH. Husein Muhammad memberikan dorongan kepada para perempuan agar ikut berpartisipasi dalam politik dan ranah publik khususnya dalam hal perencanaan pembangunan yakni dengan menyumbangkan pikiran atau gagasan-gagasan berupa saran, masukan, dan pandangannya terhadap bagaimana proses pembangunan berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting karena

⁵ Husein Muhammad, *Islam agama Rahma perempuan*, Yogyakarta : IrcisodIrcisod, 2021, hal 192

⁶ Husein Muhammad, *Islam agama Rahma perempuan*, Yogyakarta : IrcisodIrcisod, 2021, hal 189

nantinya akan menjadi acuan guna pengambilan suatu kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan ke depannya.

Partisipasi mengandung dua poin penting yaitu antara lain : *pertama* partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan khusus, *kedua* partisipasi sebagai bagian individu di luar aktivitas dalam pembangunan. Sedangkan Partisipasi pembangunan secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara fisik dan mental atau emosional. Keterlibatan mental dan emosional seseorang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya dengan tujuan mendukung keberhasilan pembangunan sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan rasa memiliki dan ikut menyumbang serta bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan.⁷

Menurut pandangan KH. Husein Muhammad setidaknya terdapat empat kerektria dalam partisipasi yaitu : Memiliki Kecerdasan, Bebas dari Intervensi, Aktif, memiliki Kemampuan.⁸ Sedangkan menurut Santoso Sastropoetro dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Komunikasi Partisipasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional* terdapat tiga kriteria dalam partisipasi yaitu : partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga dan pikiran, partisipasi keterampilan.⁹

Pada dasarnya Islam merupakan agama yang memiliki misi pembebas dan setiap agama memiliki misi tersebut. Misi pembebas dapat terlihat dalam teks kitab suci yang menjadi refleksi kehidupan nyata oleh para penganutnya, Islam merupakan agama yang Syarat akan tali persaudaraan yang universal, kesetaraan, dan keadilan sosial, Islam telah menyerukan kesatuan manusia, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, Surah Al Hujurat ayat 13 :

“Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di

⁷ Yokebet Mirqntiono, Skripsi : *Partisipasi Perempuan dalam pembangunan desa Jeruk wangi kecamatan bangsri kabuoqten jepqra*, UNNES Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial.

⁸ KH Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, Yogyakarta : IRCisoD,2021, Cet 1, Hal 196.

⁹ Santoso Sastropoetro, 1988, *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni, 2007, hal 44.

antara kamu di sisi Allah ialah yang paling Taqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al Hujurat : 13).¹⁰

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat membedakan manusia kecuali ketakwaannya kepada Allah SWT, dan ayat tersebut secara tidak langsung telah menolak terhadap konsep superioritas dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi para perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam berbagai bidang baik itu di tingkat atas hingga tingkat desa, kerennanya Al Qur'an sudah memberikan penjelasan yang detail berkaitan dengan hak hak perempuan dan banyak tokoh tokoh feminisme yang memperjuangkan kaum wanita sebagaimana KH. Husein Muhammad, Qosyim Amin, Asghar Ali dan tokoh-tokoh Feminisme lainnya.¹¹

Tuhan memberi mereka, baik laki-laki maupun perempuan, potensi dan *al-ahliyyah* (kemampuan untuk bertindak mandiri) yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab memenuhi amanat ini. Tidak sedikit teks suci yang menekankan perlunya laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam tugas mengatur dunia ini. Laki-laki dan perempuan yang beriman, menurut Al-Qur'an, bekerja sama untuk tugas-tugas keagamaan: memajukan kebaikan dan menghilangkan keburukan (kerusakan sosial).

Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan dasar yang cukup untuk melegitimasi bagaimana partisipasi perempuan dalam ranah publik tidak dibedakan dengan partisipasi laki-laki. Partisipasi mereka mencakup seluruh dimensi kehidupan. Diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan dan laki-laki untuk menjalankan peran politik domestik dan publik, menjadi cerdas dan terampil.

Berkaitan dengan kesetaraan gender dalam lingkup partisipasi perempuan KH Husein Muhammad memberikan definisi bahwasanya Islam harus dibangun dalam fondasi demokratis dengan kerangka berpikir yang memerhatikan berbagai aspek, seperti keadilan dan kesetaraan serta memberikan penghormatan atas segala hak sesama manusia. Keniscayaan perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya pada masa kini telah menuntut dan mengharuskan para perempuan terlibat dalam setiap aktivitas publik secara lebih luas sebagaimana para perempuan mengikuti musyawarah bersama

¹⁰ Qur'an Kemenag , *Lajnah pentashih mushaf Al Qur'an*, Jalan raya taman mini Indonesia Indah pintu 1 Jakarta Timur.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan teologi Pembahasan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2009. Hal 09.

guna proses pembangunan baik itu di tingkat pusat, daerah ataupun desa. Para perempuan harus ikut andil dalam berbagai perumusan kebijakan, berbagai musyawarah, dan berbagai kegiatan kegiatan lainnya, hal ini penting dan sangat diperlukan guna menciptakan pembangunan yang berbasis kesetaraan gender.¹²

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan memainkan peran ini bersama laki-laki. Khadijah Ra., Aisyah Ra., Ummu Salamah Ra., dan istri-istri Rasulullah lainnya. Fathimah Ra. (putri nabi), Zainab Ra. (cucu nabi), dan Sukainah Ra. (cicit Nabi) berjenis kelamin perempuan. Mereka para sahabat dan keluarga nabi ikut berperan dalam bidang politik dan publik, mereka berpartisipasi dalam berbagai hal, seperti berdiskusi, ikut merumuskan kebijakan dan mengkritisi suatu kebijakan.

Sama seperti tokoh feminisme muslim yang lainya dalam merumuskan pemikiran pemikirannya KH. Husein muhammad selalu berpedoman pada Al Qur'an, hal ini sesuai dengan pendapat beliau seyogyanya semua harus merujuk kepada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukan makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki yaitu ikut andil dalam berbagai kegiatan yang bersifat publik.

Menurut KH Husein Muhammad para perempuan kini mulai menguasai kelebihan-kelebihan yang "katanya" hanya dimiliki laki-laki, sehingga monopoli laki-laki mulai terbantahkan dengan sendirinya. Kini kiprah perempuan banyak di jumpai dalam tanan publik seperti hal nya partisipasi mereka dalam berbagai hal tak tantara lain dalam pembangunan mereka ikut andil di dalamnya mulai dari proses diskusi, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan pembangunan tersebut. Ini semua membuktikan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam sisi peran, sehingga sudah seharusnya segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip

¹² Soud Sarim Karimullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdurrauf Jurnal of Islamic studies (ARJIS), *reinterpretasi terhadap kedudukan perempuan dalam Islam melalui takwil gender KH. Husein Muhammad*, Vol. 1. No 2, Juni 2022.

ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.¹³

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas dan hasil wawancara, secara umum partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa tengguli sudah cukup baik, dan keterwakilan 30% perempuan sudah terpenuhi, di sisi lain masih terdapat kendala seperti halnya dalam pelaksanaan musrenbang terdapat masyarakat yang tidak hadir dengan berbagai alasan di antaranya, urusan keluarga yang urgen, pekerjaan yang tidak bisa di tingal, mengurus anak, dan lain lain, para perempuan di dalam forum pertemuan seperti halnya musrenbang, pertemuan tingkat RT sangat aktif maka dari itu peneliti tertarik mengungkap apakah hal tersebut benar adanya atau hanya se stigma stigma dari berbagai pihak di samping itu peneliti juga ingin mengetahui seberapa tinggi partisipasi perempuan di desa Tengguli kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Penelitian ini akan menghadirkan pandangan dari tokoh feminisme Muslim KH. Husein Muhammad yang nantinya akan memberikan konsep konsep pemikirannya berkaitan dengan kesetaraan Gender dalam lingkup partisipasi perempuan guna perencanaan pembangunan yang ada di desa Tengguli. Perempuan di desa tengguli dalam berpartisipasi sudah cukup baik, hal ini di buktikan dengan forum-forum pertemuan seperti Musrenbang, rapat evaluasi, rapat tingkat RT para perempuan turut hadir dan berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya baik itu gagasan, maupun pandangannya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji mengenai partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Desa Tengguli kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara di lihat dari sudut pandang KH. Husein Muhammad. Dalam penelitian ini nantinya akan mengukur seberapa tinggi tingkat partisipasi dan keaktifan para perempuan kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan desa Tengguli dalam berbagai forum. Sedangkan perspektif KH. Husein Muhammad mengenai partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Tengguli akan di kaji menggunakan implementasi teori konsep kesetaraan Gender. Fokus tempat dalam

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hal 33

penelitian ini ialah Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, sedangkan fokus objek dalam penelitian ini ialah para kader desa, PKK, kader Posyandu dan akademisi yang ada di desa Tengguli.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas maka timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Desa Tengguli kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad mengenai kesetaraan Gender dalam lingkup partisipasi perempuan guna perencanaan pembangunan Desa Tengguli kecamatan Bangsri kabupaten Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan Desa Tengguli kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk Menganalisis pandangan KH. Husein Muhammad mengenai kesetaraan Gender dalam lingkup partisipasi perempuan guna perencanaan pembangunan Desa Tengguli kecamatan Bangsri kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis teliti diharapkan memberikan manfaat, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan memperoleh kebijakan yang tepat berkaitan dengan Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan perspektif KH. Husein Muhammad Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Di samping itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat khususnya perempuan desa dan aparat Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara agar supaya perempuan di pertahanan tingkat keaktifannya khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan guna menyukkseskan pembangunan desa yang berbasis kesetaraan Gender.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan perspektif KH. Husein Muhammad di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

F. Sistematika Penelitian

Gambaran umum penelitian ini dapat diketahui dengan mudah, pembahasan penelitian yang berkaitan dengan Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan perspektif KH. Husein Muhammad (Studi Kasus Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). akan di bahas secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi : halaman judul, pengesahan majelis penguji, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian utama

Bagian utama meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian pustaka

Terdiri atas kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode penelitian

Terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

Terdiri atas gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Terdiri dari simpulan dan saran.

Bagian akhir, Bagian akhir terdiri atas **Daftar Pustaka** dan **Lampiran-Lampiran**.